



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **OLGA PRAGOSTA**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM**
3. NHK : **406129**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.603.900.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 182.400.000
3. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000
4. Tanah Seluas 355 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 213.000.000
5. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
6. Tanah Seluas 3400 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
7. Tanah Seluas 1425 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 427.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **175.000.000**

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



3. MOBIL, SUZUKI APV MEGA CARRY Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	16.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.407.664
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.821.407.664
III. HUTANG	Rp.	111.687.323
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.709.720.341

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.